

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos/ Radar Semarang	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: Kabupaten Kudus

Halaman 3 dan 10

## Formasi PPPK di Kudus Belum Jelas

**BKPP Tunggu Pengumuman Resmi BKN**

**KUDUS**-Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kudus hingga kini belum bisa memastikan, jumlah usulan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019. Diperkirakan ada sekitar 72 orang, dari 210 orang yang lolos dan mengisi usulan formasi PPPK di Kabupaten Kudus. Terdiri dari 180 tenaga honorer (K2) guru dan 29 penyuluh pertanian. Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Kudus Hartopo saat ditemui di Pendapa Kabupaten Kudus.

"Jumlah itu masih perkiraan, bisa saja lebih. Kepastiannya nanti menunggu pengumuman dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN)," kata Hartopo, belum lama ini.

Adapun anggaran gaji untuk PPPK, kata Hartopo, dai hasil pembahasan sementara, estimasi anggarannya kurang lebih sebesar Rp 5 miliar yang bersumber dari APBD Perubahan 2019.

Menurutnya, adanya PPPK ini, secara tidak langsung akan mengurangi tenaga honorer dan K2 siluman di Kudus.

Dia menegaskan, terkait K2 siluman, kalau memang ada dan terbukti bukan murni K2, akan ditindak tegas, bahkan sampai dituntaskan hingga pusat. Dengan demikian, pihaknya meminta kepada siapapun yang mempunyai informasi kecurangan tersebut, langsung melaporkan ke bupati atau wabup Kudus. "Kalau ada informasi dugaan kecurangan, langsung saja lapor ke bupati atau wakil," pintanya.

Terpisah, Plt Kepala BKPP Kudus, Yuli Tri Nugroho mengatakan, jumlah PPPK yang lolos belum bisa dipastikan, dan Pemkab Kudus belum menganggarkan gajinya. Mengingat, program pemerintah pusat tersebut digulirkan setelah APBD Kudus ditetapkan. Sehingga akan dianggarkan pada APBD Perubahan 2019 sebesar Rp 5 miliar. "Estimasi anggarannya segitu," jelasnya.

Yuli memaparkan, kebutuhan P3K di Kudus yaitu tenaga guru dan penyuluh pertanian. Namun yang disetujui oleh BKN belum diketahui, karena belum ada pengumuman lanjutan. Dengan demikian, BKPP Kudus masih menunggu pengumuman resmi dari BKN, sebab penerimaan PPPK baru tahap I. Tahun berikutnya, dimungkinkan juga akan ada penerimaan untuk tahap II, tergantung kepada kebijakan pemerintah pusat.

"Kebutuhan



PPPK disesuaikan dengan anggaran APBD Kudus," tambahnya. Menanggapi pelamar K2 yang hanya memiliki ijazah D2 maupun D3, Yuli meminta kepada yang bersangkutan untuk melengkapi atau menyesuaikan menyerahkan ijazah S1. Hal itu untuk menghadapi kemungkinan adanya perubahan persyaratan, yang diinginkan oleh Pemerintah Pusat terkait penerimaan PPPK selanjutnya.

"Sistem yang diberlakukan sudah seperti itu," pungkasnya. (han/lis)